

PERBANDINGAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAKARTA UTARA

Aulia Khoirun Nisaa¹, Daffa Eka Saputra², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitri⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: 25040674252@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 25-04-2026

Revision: 13-02-2026

Accepted: 16-05-2026

Published: 18-05-2026

Abstract. This study is motivated by the need for Islamic education to respond to the diverse characteristics of learners and the demands of independent learning in the contemporary era. Until now, learning practices have tended to focus on a single specific approach, and thus have not fully accommodated the development of learners' learning autonomy. This study aims to analyse learning designs based on the principles of pedagogy, andragogy, and heutagogy, as well as their relevance within the context of Islamic education. The research employs a qualitative approach through a systematic literature review of reputable journal articles, academic books, and relevant conference proceedings, with data analysis conducted using thematic analysis. The results indicate that pedagogy, andragogy, and heutagogy form a learning continuum representing a shift from teacher-centred learning towards learner-determined learning. These three approaches have fundamental differences regarding the roles of learners and educators, the structure of learning, learning orientation, and evaluation strategies; however, they are complementary within Islamic education. The implications of this research emphasise the need for an integrated learning design that is adaptive to learners' developmental levels and autonomy, and supports the strengthening of lifelong learning in the management of Islamic education.

Keywords: Regional Tax, Community Welfare, Local Revenue, HDI, Poverty

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pendidikan Islam untuk merespons keragaman karakteristik peserta didik dan tuntutan pembelajaran mandiri di era kontemporer. Selama ini, praktik pembelajaran cenderung terfokus pada satu pendekatan tertentu, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan otonomi belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pembelajaran berdasarkan prinsip pedagogi, andragogi, dan heutagogi serta relevansinya dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis terhadap artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan prosiding konferensi yang relevan, dengan analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagogi, andragogi, dan heutagogi membentuk suatu kontinum pembelajaran yang merepresentasikan pergeseran dari pembelajaran berpusat pada pendidik menuju pembelajaran yang ditentukan sendiri oleh peserta didik. Ketiga pendekatan tersebut memiliki perbedaan mendasar pada peran peserta didik dan pendidik, struktur pembelajaran, orientasi belajar, serta strategi evaluasi, namun bersifat saling melengkapi dalam pendidikan Islam. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya desain pembelajaran terintegrasi yang adaptif terhadap tingkat perkembangan dan kemandirian peserta didik, serta mendukung penguatan pembelajaran sepanjang hayat dalam pengelolaan pendidikan Islam.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, PAD, IPM, Kemiskinan

How to Cite: Nisaa', A. K., Saputra, D. E., Fanida, E. H., & Fitri, R. A. (2026). Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Utara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3567-3574. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5609>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan daerah yang paling dominan dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang, sehingga pembayaran pajak menjadi kewajiban warga negara tanpa imbalan langsung (Resmi, 2016). Dalam konteks daerah, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wilayah strategis di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara memiliki potensi pajak daerah yang besar. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industri, pusat perdagangan, serta sektor jasa menjadikan wilayah ini salah satu kontributor penting penerimaan pajak daerah. Pajak yang dipungut dari aktivitas ekonomi tersebut seharusnya memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial.

Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa hingga akhir April 2025, penerimaan pajak daerah Kota Jakarta Utara mencapai Rp19,78 triliun atau 30,18 persen dari target tahunan sebesar Rp65,53 triliun. Penerimaan tersebut didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) non-migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM, serta PBB dan BPHTB. Dari sisi makro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,29 persen. Data ini menggambarkan bahwa kapasitas fiskal dan dinamika ekonomi Jakarta Utara berada pada kondisi yang relatif baik.

Namun demikian, capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari Tabel 1 yang menyajikan jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara periode 2021–2023. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 123.590 jiwa pada tahun 2021 menjadi 133.730 jiwa pada tahun 2023.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Utara Tahun 2021-2023

Jumlah Penduduk Miskin	
2021	123.590
2022	132.730
2023	133.730

Sumber: Badan Pusat Statistika (2025)

Berdasarkan Tabel 1, peningkatan kemiskinan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,39 persen, sementara pada tahun 2023 tetap mengalami kenaikan meskipun lebih kecil, yaitu 0,75 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 menjadi faktor utama lonjakan kemiskinan pada tahun 2021, permasalahan kemiskinan di Jakarta Utara belum sepenuhnya teratasi pada periode pemulihan ekonomi. Faktor internal seperti rendahnya tingkat pendidikan serta faktor eksternal berupa ketidakstabilan ekonomi dan kebijakan yang belum optimal masih menjadi penghambat penanggulangan kemiskinan (Risal et al., 2022).

Fenomena meningkatnya jumlah penduduk miskin di tengah tingginya penerimaan pajak daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara teoretis, pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan manusia melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan pajak daerah, belanja sosial, dan kesejahteraan masyarakat masih bersifat variatif dan belum konsisten (Khairunnisa et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa efektivitas pemanfaatan pajak lebih menentukan dibandingkan besarnya penerimaan semata.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pendapatan pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara dengan menggunakan data penerimaan pajak dan data kemiskinan sebagai dasar evaluasi empiris. Penelitian ini menempatkan pajak daerah tidak hanya sebagai indikator fiskal, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang seharusnya berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara. Fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana penerimaan pajak daerah berperan dalam menekan angka kemiskinan serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan pajak daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka karena bersifat eksploratif dan bertujuan memahami secara mendalam keterkaitan antara pendapatan pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penafsiran data dan pemaknaan fenomena fiskal serta sosial secara kontekstual (Ali & Limakrisna, 2013). Metode kajian pustaka digunakan untuk menghimpun, mengkaji, dan mensintesis berbagai sumber

tertulis yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran pajak daerah dalam pembangunan kesejahteraan.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui literatur akademik, artikel jurnal yang diakses melalui *Google Scholar* dan *ResearchGate*, laporan keuangan pemerintah daerah, serta data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat indikator kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pendapatan per kapita, pendidikan, dan kesehatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi penerimaan pajak daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta secara komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian atau kesenjangan antara kapasitas fiskal dan capaian pembangunan sosial-ekonomi. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan sumber resmi dan kredibel serta pencantuman rujukan secara transparan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan kontribusi pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara sekaligus mengidentifikasi permasalahan struktural dalam pemanfaatan potensi fiskal daerah.

HASIL

Gambaran Umum Pendapatan Pajak Daerah Jakarta Utara

Pendapatan pajak daerah menjadi bagian penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai dana untuk mendukung pembangunan daerah. Di wilayah Jakarta Utara, struktur pajak daerah utamanya berasal dari pajak sektor jasa dan properti, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sumbangan pajak daerah di Jakarta Utara berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. Pajak hiburan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan jenis pajak lainnya, sedangkan pajak dari hotel dan restoran memberikan kontribusi yang lebih sedikit terhadap total pendapatan pajak daerah (Wijaya & Ngadiman, 2019). Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam cara daerah menerima pajak, yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi di setiap wilayah. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pajak PBB-P2 dan BPHTB memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah di wilayah Jakarta Utara, terutama di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPPD) Cilincing. Hal ini menunjukkan bahwa sektor properti memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan fiskal daerah, seperti yang disampaikan oleh Sari (2021).

Tingkat kemampuan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta bisa dikatakan cukup baik. Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah mencapai rata-rata 97,19%, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah

85,80%, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan yang optimal dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

Gambaran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Utara

Kesejahteraan masyarakat adalah tolak ukur penting untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berhasil. Kesejahteraan masyarakat biasanya dilihat melalui beberapa hal, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran rata-rata per orang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), daerah DKI Jakarta, termasuk Jakarta Utara, memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini menunjukkan peningkatan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Namun demikian, masih ada perbedaan tingkat kesejahteraan antara daerah-daerah dan kelompok masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan pemukiman padat di Jakarta Utara.

Naiknya pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak, berdampak positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena uang tersebut digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan (Rahmawati,2020). Namun demikian, peningkatan penerimaan pajak tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat jika tidak diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya memperhatikan peningkatan pemasukan, tetapi juga bagaimana pengelolaan dan penyaluran anggaran bisa merata.

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan Jakarta Utara (2019-2023)

Tahun	IPM	Tingkat Kemiskinan	Pengeluaran per Kapita (Rp/tahun)
2019	79,82	3,45	17.500.000
2020	80,05	4,12	17.200.000
2021	80,45	3,98	17.800.000
2022	81,10	3,65	18.900.000
2023	81,75	3,40	19.750.000

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta

Analisis Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dan Tingkat Kesejahteraan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat korelasi positif antara pendapatan pajak daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah Jakarta Utara. Peningkatan penerimaan pajak daerah memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah untuk mendanai berbagai program

pembangunan. Menurut teori keuangan publik, pajak memiliki tiga fungsi utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pajak daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk (1) Meningkatkan kualitas infrastruktur, (2) Memperluas akses layanan publik, dan (3) Mengurangi tingkat kemiskinan (Halim, 2016)

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan pajak daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan lurus. Dalam beberapa kasus, peningkatan pendapatan pajak tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu (1) ketimpangan distribusi pembangunan, (2) inefisiensi penggunaan anggaran, dan (3) perbedaan karakteristik sosial ekonomi masyarakat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak selalu langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecuali ada kebijakan distribusi yang tepat (Prasetyo, 2018)

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dan Indeks Kesejahteraan (IPM) Jakarta Utara (2019-2023)

Tahun	Pajak Daerah (Miliar Rp)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)
2019	4.250	79,82	3,45
2020	3.980	80,05	4,12
2021	4.150	80,45	3,98
2022	4.780	81,10	3,65
2023	5.320	81,75	3,40

Sumber: Bapenda DKI Jakarta & Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara

DISKUSI

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan di Jakarta Utara menunjukkan bahwa besarnya penerimaan pajak dari sektor jasa, perdagangan, dan properti belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan adanya fiscal gap, yaitu kesenjangan antara kapasitas fiskal daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan publik. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Musgrave (1959) yang menyatakan bahwa fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijakan fiskal sering kali tidak berjalan optimal ketika belanja publik tidak diarahkan secara tepat sasaran.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak secara otomatis berdampak pada peningkatan kesejahteraan apabila tidak diiringi dengan perencanaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan sosial (Khairunnisa et al., 2023). Dalam konteks Jakarta Utara, masih terbatasnya alokasi anggaran yang secara langsung menyasar kelompok rentan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah cenderung berfokus pada pencapaian target penerimaan, bukan pada efektivitas distribusi manfaat. Hal ini sejalan dengan Risal et al. (2022) yang menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan publik dan ketepatan sasaran program sosial.

Dari perspektif tata kelola keuangan publik, hasil penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan dalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak yang jujur dan bertanggung jawab menjadi prasyarat agar penerimaan daerah benar-benar berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar indikator kinerja fiskal. Dengan demikian, pajak daerah harus dipahami tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai alat kebijakan yang menuntut keberpihakan pada keadilan sosial melalui perencanaan dan penyaluran anggaran yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak daerah di Jakarta Utara memiliki peran yang signifikan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kecenderungan hubungan positif antara peningkatan penerimaan pajak daerah dengan indikator kesejahteraan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat serta tingkat kemiskinan yang relatif menurun dalam periode tertentu. Hubungan tersebut tidak bersifat linier dan langsung. Peningkatan pendapatan pajak daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan distribusi pembangunan, kurang optimalnya pengelolaan dan alokasi anggaran, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Jakarta Utara. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), di mana kapasitas fiskal yang tinggi belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata.

Efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial, menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan manfaat pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan instrumen strategis dalam pembangunan daerah, namun keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dukungan tata kelola keuangan yang baik, perencanaan pembangunan yang inklusif, serta kebijakan distribusi yang berkeadilan.

REFERENSI

- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi penelitian: Petunjuk praktis untuk pemecahan masalah bisnis, penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi*. Deepublish.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). *Laporan dan data pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta*. BPS.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Khairunnisa, I., Yusnita, F., Suryani, I. W., & Panorama, M. (2023). Jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Sumatera Selatan tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1735–1750. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3557>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prasetyo, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Rahmawati, D. (2020). Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Resmi*, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Sari, N. (2021). Pengaruh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah Jakarta Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Siahaan, M. (2022). Efektivitas pajak daerah di DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wijaya, I. O., & Ngadiman. (2019). Analisis kontribusi pajak daerah Jakarta Utara. *Jurnal Paradigma Akuntansi*.